



2025

**RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Nias Selatan, serta rencana kerja dan pendanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Telukdalam, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan



F. Martin Ley, SE., MM

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19750316 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahu Lalu dan CapaianRENSTRA Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah12 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
4.1 Program dan Kegiatan	28
BAB V PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditunjang dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara

kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja PD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan RKPD
2. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja PD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumberdananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program / kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan danmempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 dan mengacu pada Rancangan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 masih bersifat indikatif karena masih harus

diselaraskan dengan program dan kegiatan Prioritas daerah atau prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 1 (satu) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD yang dilanjutkan dengan RENJA PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah PD. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan membuat RENJA yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nias Selatan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias Selatan

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, antara lain:

- 2 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
- 16 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5-57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan;
- 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

18 Keputusan Bupati Nias Selatan nomor tahun 2024 tentang Penetapan Tim Penyusun RKPD KabupTen Nias Selatan Tahun 2025

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan di tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dokumen Rencana Kerja bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 dengan berdasarkan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
- 2) Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Diharapkan dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan akan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
1.	Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3.	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5.	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
1.	Telaahan terhadap kebijakan Nasional
2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
1.	Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 telah terlaksana sesuai dengan dokumen rencana kerja perubahan tahun 2023. Faktor pendukung keberhasilan realisasi dari seluruh program dan kegiatan pada tahun 2023 yaitu adanya koordinasi dan komunikasi di semua lini pada Dinas Perindustria dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan untuk memberhasilkan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Implikasi terhadap capaian realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 yaitu pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat terlaksana dengan baik, pemantauan harga kebutuhan pokok dapat terlaksana sehingga harga kebutuhan pokok dapat diawasi serta memudahkan Pejabat Pengambil keputusan untuk memberikan kebijakan dalam stabilisasi harga.

Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel T-C. 29

Tabel T-C. 29														
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024														
Kabupaten Nias Selatan														
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Kabupaten pada tahun 2022-2026 (Selama 5 Tahun)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2022)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3				URUSAN PILIHAN										
3	30			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN										
3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	60 %	60%	
3	30	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	40 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	100%	8 Dok	24 Dok	60%	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%

3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dok	3 Dok	3 Dok	4 Dok	133%	3 Dok	10 Dok	67%
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	25 Lap	19 Lap	19 Lap	19 Lap	100%	5 Lap	43 Lap	172%
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Org/Bln	14 Org/Bln	14 Org/Bln	14 Org/Bln	100%	14 Org/Bln	42 Org/Bln	60%
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	3 Lap	60%
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	12 Lap	48%
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	15 Lap	- Lap	3 Lap	3 Lap	100%	1 Lap	4 Lap	27%
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Lap	- Lap	1 Lap	3 Lap	300%	1 Lap	4 Lap	80%
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah	125 Org	- org	25 Org	25 Org	100%	25 Org	50 Org	40%
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 Paket	- Paket	25 Paket	25 Paket	100%	25 Paket	50 Paket	40%

3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	60 %	60%
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	60%
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	60%
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	36 Lap	60%
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	37 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	6 Unit	14 Unit	38%
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	- Unit	1 Unit	4 Unit	400%	1 Unit	5	250%
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	4 Unit	5 Unit	2 Unit	40%	5 Unit	11 Unit	55%
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	60 %	60%
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7500 Lap	1000 Lap	1500 Lap	1500 Lap	100%	1500 Lap	4000 Lap	53%
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Lap	8 Lap	9 Lap	9 Lap	100%	9 Lap	26 Lap	58%
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	25 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	17 Unit	19 Unit	76%
	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	7 Unit	700%	1 Unit	9 Unit	180%
	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	- Unit	1 Unit	2 Unit	200%	1 Unit	3 Unit	300%
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perdagangan	90 %	- %	75 %	83,3 %	111%	80 %	33 %	36%
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat	33 Unit	- Unit	6 Unit	5 Unit	83%	7 Unit	12 Unit	36%
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit	- Unit	1 Unit	- Unit	0%	2 Unit	2 Unit	25%
3	30	03	2.01	02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	25 Unit	- Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	10 Unit	40%
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja realisasi pupuk	75 %	75 %	75 %	65,57 %	87%	80 %	44,114 %	59%
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	205 Lap	30 Lap	41 Lap	31 Lap	76%	41 Lap	102 Lap	50%

3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	150 Lap	30 Lap	30 Lap	30 Lap	100%	30 Lap	90 Lap	60%
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Lap	- Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	150 Lap	- Lap	70 Lap	25 Lap	36%	70 Lap	95 Lap	63%
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	125 Lap	- Lap	25 Lap	25 Lap	100%	25 Lap	50 Lap	40%
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang terselesaikan	100 %	25 %	100 %	25 %	25%	100 %	10 %	10%
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	20 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	4 Dok	6 Dok	30%
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	5 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
3	31	02	2.01	04	koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
3	31	02	2'01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tercantum dalam Tabel T-C 30 berikut ini.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thnn-2)	Tahun 2024 (thn n-1) (Triwulan II)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Laki	-	-	B	B	B	B	A	-	A	A	
2	Persentase dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	38%	100%	100%	
3	Persentase kinerja ralisasi pupuk subsidi	-	√	75%	80%	85%	75%	65,57	29,00%	71%	71%	
4	Persentase Monitoring dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	51%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat

Daerah

Secara normatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Belum adanya produk-produk unggulan yang bisa diekspor di luar daerah
2. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam membina pelaku usaha orientasi ekspor
3. Sarana prasarana pasar yang masih perlu perbaikan menuju pasar sehat dan modern
4. Turunnya minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar rakyat semenjak adanya pasar pasar Modern yang ada di sekitar kota kabupaten
5. Pasca berlakunya sistem OSS pada perizinan menurunkan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus rekomendasi / komitmen ke Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk baru atau perpanjangan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan bidang perdagangan.
6. Belum maksimalnya kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Setelah menelaah beberapa permasalahan dan dalam rangka mendorong pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, Serta Capaian Program maka dirumuskan beberapa isu – isu penting / strategis yang akan di tindak lanjuti dalam perumusan Program Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yaitu :

1. Masih banyak terdapat pasar yang kurang layak dan sehat dari segi fisik maupun sarana dan prasarana nya menuju pasar sehat dan modern
2. Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.

3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pedagang di wilayah pasar yang dikelola pemerintah
4. Rendahnya daya saing produk lokal dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk serta kemasan
5. Kurangnya pengawasan terhadap perizinan toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang sesuai aturan
6. Peningkatan Komoditi ekspor produk unggulan daerah Kabupaten Nias Selatan
7. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam Daerah maupun luar Daerah
8. Penataan toko modern
9. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)) dengan UPT Kemetrolagian
10. Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha termasuk penyaluran pupuk bersubsidi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Nias Selatan. Dalam Rancangan RKPD Tahun 2025 beberapa program yang tidak terakomidir dikarenakan penyesuaian anggaran yang tersedia. Untuk kondisi anggaran tahun 2025 belum sesuai dengan kebutuhan yang ada. Review Rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel T-C 31 dibawah ini

Tabel T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Nias Selatan

Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nisel	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	2.028.518	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nisel	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	850.000	Program Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	45.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	30.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	7.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin

3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	5 Lap	862.579	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	5 Lap	73.840	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nisel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bl n	847.579	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nisel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bl n	63.840	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	4 Lap	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	4 Lap	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	3 Lap	30.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	3 Lap	35.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	10.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	15.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.03	0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	10.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	15.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	10.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	25 Org	90.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	25 Org	45.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nisel	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25 Unit	30.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nisel	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Unit	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nisel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	30.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nisel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	20.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nisel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Org	30.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nisel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 org	25.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin

3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nisel	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	632.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nisel	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	437.160	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nisel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nisel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nisel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nisel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nisel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	50.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nisel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nisel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nisel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nisel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nisel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nisel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	17.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nisel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	287.160	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	15.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	10.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nisel	Jumlah pengadaan barang milik daerah	20 Unit	90.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nisel	Jumlah pengadaan barang milik daerah	2 Unit	63.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nisel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	50.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nisel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nisel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15.000	Pengadaan Mebel	Nisel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nisel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nisel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nisel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nisel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	23.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin

3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nisel	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 %	191.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nisel	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 %	96.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Lap	15.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Lap	10.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	2.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Lap	174.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Lap	81.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nisel	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	17 Unit	86.939	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nisel	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	1 Unit	70.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nisel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	43.762	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nisel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Unit	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nisel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.177	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nisel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	45.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nisel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nisel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.068.999	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				500.000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nisel	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	60 %	165.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nisel	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	60 %	15.000	Program Pemberantasan Kemiskinan Ekstrim
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Nisel	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	Dok	30.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Nisel	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	40 Dok	15.000	Kegiatan Penunjang Program Pemberantasan Kemiskinan Ekstrim

3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nisel	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dok	30.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nisel	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dok	15.000	Sub Kegiatan Penunjang Program yang termasuk dalam pemberantasan kemiskinan ekstrim
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Nisel	Jumlah Izin Usaha yang di terbitkan kepada Pengecer / Penjual	40 Dok	45.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Nisel	Jumlah Izin Usaha yang di terbitkan kepada Pengecer / Penjual	- Dok	-	Kegiatan Penunjang Program
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Nisel	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dok	45.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Nisel	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nisel	Adanya Pengendalian dan Pengawasan Bahan Berbahaya	40 Lap	90.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nisel	Adanya Pengendalian dan Pengawasan Bahan Berbahaya	15 Lap	-	Kegiatan Penunjang Program
3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Nisel	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	40 Lap	45.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Nisel	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	15 Lap		Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	02	2.06	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	40 Dok	45.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	15 Dok		Sub Kegiatan Penunjang Program

3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nisel	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	85 %	608.999	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nisel	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	85 %	195.000	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat	7 Unit	508.999	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat	7 Unit	195.000	Kegiatan Penunjang Program
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	458.999	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	105.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	50.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	90.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Nisel	Terkelolanya sarana distribusi perdagangan dengan baik	10 dok	100.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Nisel	Terkelolanya sarana distribusi perdagangan dengan baik	- Dok	-	Kegiatan Penunjang Program
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dok	50.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dok	50.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nisel	Persentase Kinerja realisasi pupuk	85 %	295.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nisel	Persentase Kinerja realisasi pupuk	85 %	240.000	Program Prioritas Daerah/Pemb erantasan Kemiskinan Ekstrim
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nisel	Tersedianya barang Kebutuhan barang Pokok bagi Masyarakat	105 Lap	135.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nisel	Tersedianya barang Kebutuhan barang Pokok bagi Masyarakat	105 Lap	50.000	Kegiatan Prioritas Daerah

3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35 Lap	45.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35 Lap	50.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35 Lap	45.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	- Lap	-	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35 Lap	45.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	- Lap	-	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Nisel	Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Lap	75.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Nisel	Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	41 Lap	140.000	Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Lap	25.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Lap	40.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Nisel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30 Lap	25.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Nisel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30 Lap	50.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap	25.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap	50.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nisel	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	Lap	85.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nisel	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	30 Lap	50.000	Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Nisel	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	40 Dok	25.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Nisel	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	- Dok	-	Sub Kegiatan Prioritas Daerah

3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nisel	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5 Lap	35.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nisel	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	- Lap	-	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nisel	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	25 Lap	25.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nisel	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	25 Lap	50.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nisel	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	- %	-	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nisel	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	80 %	50.000	Program Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Nisel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Lap	-	Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Nisel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3 Lap	50.000	Kegiatan Penunjang Program Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Nisel	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	- Unit	-	Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Nisel	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	3 Unit	50.000	Sub Kegiatan Penunjang Program Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				175.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				150.000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nisel	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang terselesaikan	100 %	100.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nisel	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang terselesaikan	100 %	50.000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nisel	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Dok	100.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nisel	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	4 Dok	50.000	Kegiatan Penunjang Program
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	25.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dok	25.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dok		Sub Kegiatan Penunjang Program

3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	25.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	50.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Nisel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	25.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Nisel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Nisel	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50 %	-	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Nisel	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50 %	50.000	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Tersedianya Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Dok	-	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Tersedianya Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dok	50.000	Kegiatan Penunjang Program
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negri dan selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Dok	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negri dan selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	5 Dok	50.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nisel	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update	100 %	75.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nisel	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update	100 %	50.000	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Tersusunnya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dok	75.000	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Tersusunnya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	3 Dok	50.000	Kegiatan Penunjang Program
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	25.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	50.000	Sub Kegiatan Penunjang Program

3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dok	25.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dok	25.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
Jumlah									3.272.517	Jumlah				1.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan. Pada Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki usulan program atau kegiatan dari para pemangku kepentingan melalui Musrenbang maupun dari Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Tabel T-C 32					
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025					
Kabupaten Nias Selatan					
Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik- tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan

Pemerintah mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan mengambil peran dalam menurunkan ketimpangan dalam hal ini beberapa program yang telah disusun bertujuan untuk pemberantasan kemiskinan ekstrim. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengambil peran dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 antara lain ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan melalui program dan kegiatan yang telah disusun.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan serta sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (outcome), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta Bidang / Seksi penanggung jawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada dasarnya kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel T-C 33 di bawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						1.500.000.000,00							2.397.307.117,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.500.000.000,00							2.397.307.117,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1.350.000.000,00							2.317.307.117,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	100 Persen B Nilai/ Predikat			100 Persen B Nilai/ Predikat	850.000.000,00						100 Persen B Nilai/ Predikat	1.962.014.083,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	-			8 Dokumen 8 Dokumen	30.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	-			19 Laporan 5 Laporan	73.840.000,00			-	-	-	-	947.337.083,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	63.840.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		932.337.083,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah	-			3 Laporan 3 Laporan	35.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Manfaat Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			25 Orang 25 Orang	45.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				25 Paket	20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Layanan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 % 100 %	437.160.000,00			-	-	-	-	615.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				10 Paket	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	80.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	287.160.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	-			20 Unit 20 Unit	63.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				15 Unit	15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	23.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Peresentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>	-			100 % 1 0=Tidak ada, 1= Ada	96.000.000,00			-	-	-	-	191.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	81.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		174.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	-			17 Unit 17 Unit	70.000.000,00			-	-	-	-	43.177.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.177.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	60.00 Persen			60.00 Persen	15.000.000,00						60.00 Persen	40.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	-			40 Dokumen	15.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				40 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan	85.00 Persen			85.00 Persen	195.000.000,00						85.00 Persen	100.293.034,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				30 Laporan	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kabupaten/Kota	-			70 Laporan 30 Laporan	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				25 Laporan	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	50.000.000,00						-	0,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						150.000.000,00							80.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang terselesaikan Terselesaikannya dokumen RIPIK menjadi Perda	Ada			100 Persen Ada	50.000.000,00						Ada	50.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	-			4 Dokumen 4 Dokumen	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50.00 Persen			50.00 Persen	50.000.000,00						50.00 Persen	0,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Penerbitan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	-			1 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada			100 Persen Ada	50.000.000,00						Ada	30.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan JPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	-			3 Dokumen 3 Dokumen	50.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H							1.500.000.000,00						2.397.307.117,00		

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2025, diharapkan Pencapaian Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja PD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD).

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun Ketiga perencanaan RENSTRA dalam periode 2021-2026. Penyusunan RENJA tahun 2025, dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar Bidang, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan rencana kerja yang baik. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja PD 2025 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan dapat memberikan hasil (Outcome) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nias Selatan

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2025 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RENJA 2025 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana lainnya, antara lain:

1. RENJA Tahun 2025 merupakan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2025 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

2. RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi,
3. sinergitas, harmonisasi antar pelaku Kegiatan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RENJA tahun 2025;
4. Setiap Bidang / Seksi wajib menyesuaikan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada Ranwal dan Rankhir RENJA Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2025 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
5. Dalam pelaksanaan RENJA tahun 2025, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam RENJA tahun 2025 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala Bidang:
 - (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta
 - (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi
6. kewenangan sesuai dengan penjabaran tugas fungsi masing – masing;
7. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan di Bidang Industri dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja setiap program / kegiatan secara berkala (3

bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025;

9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun evaluasi rencana kerja (RENJA) berdasarkan hasil evaluasi Kepala Bidang, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2025;

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berisi tentang rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025 pada Organisasi Perangkat Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Keberhasilan pembangunan industri dan perdagangan, maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan khususnya ekonomi kerakyatan merupakan prioritas yang sangat vital dalam mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2025.

Telukdalam, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias selatan,



F. MARTIN LEY, SE.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750316 199803 1 007